

KOMERSIALISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA

Zainuddin & M. Rozali

Universitas Negeri Medan (UNIMED)
Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20221
e-mail: zain_djaros@yahoo.com

Abstrak: Artikel ini mengulas tentang komersialisasi pendidikan di Indonesia. Istilah komersialisasi pendidikan dapat dipergunakan pada dua hal yang berbeda. Lembaga pendidikan yang memiliki program dan sarana prasarana yang baik, dengan biaya pendidikan yang mahal sehingga hanya bisa dinikmati oleh kalangan kaya yang mampu secara ekonomi. Kemudian, lembaga pendidikan yang hanya mementingkan penarikan biaya pendidikan yang mahal, namun tidak memperhatikan peningkatan mutu pendidikan. Komersialisasi yang pertama didasarkan pada kebutuhan obyektif lembaga untuk mengembangkan proses pendidikan yang berkualitas, sedangkan yang kedua didasarkan pada nafsu serakah para pengelola pendidikan. Penyebab terjadinya komersialisasi pendidikan diantaranya: Politik, budaya, ekonomi, sosial, dan teknologi. Komersialisasi pendidikan ini juga akan memberikan dampak: masyarakat kalangan bawah tak mampu untuk merealisasikan keinginannya dikarenakan biaya pendidikan yang mahal; memperkaya pihak-pihak tertentu; biaya yang dibayar tidak sebanding dengan sarana-prasarana yang diterima; biaya yang dibayar tidak sebanding dengan kualitas lulusan suatu lembaga pendidikan formal-informal; Menimbulkan kesenjangan sosial kelompok orang-orang kaya dan kelompok orang-orang miskin; Tanpa adanya alternatif lain untuk mengimbangi akan menyebabkan kompetisi untuk memperoleh pendidikan di lembaga pendidikan terkenal baik dalam negeri maupun luar negeri. Ada dua solusi dalam komersialisasi: Pertama, sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Kedua, teknis,

yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan.

Kata Kunci: pendidikan, kompetitif, propit.

Abstract: This article reviews the commercialization of education in Indonesia. The term commercialization of education can be used in two different ways. Educational institutions that have good programs and infrastructure, with expensive educational costs so that they can only be enjoyed by the economically well-off. Then, educational institutions that only pay attention to the withdrawal of expensive tuition fees, but do not pay attention to improving the quality of education. The first commercialization is based on the objective need of the institution to develop a quality educational process, while the second is based on the greed of education managers. The causes of the commercialization of education include: Political, cultural, economic, social, and technological. The commercialization of education will also have an impact: the lower classes of society are unable to realize their desires due to the high cost of education; enrich certain parties; the fees paid are not commensurate with the facilities received; the fees paid are not commensurate with the quality of graduates of a formal-informal educational institution; Create social inequality groups of rich people and groups of poor people; Without any other alternative to compensate, it will cause competition to obtain education at well-known educational institutions both domestically and abroad. There are two solutions in commercialization: First, systemic, namely the solution by changing social systems related to the education system. Second, technical, namely solutions that involve technical matters directly related to education.

المخلص: يستعرض هذا المقال تسويق التعليم في إندونيسيا. يمكن استخدام مصطلح تسويق التعليم بطريقتين مختلفتين. المؤسسات التعليمية التي لديها برامج جيدة وبنية تحتية جيدة، مع تكاليف

تعليمية باهظة بحيث لا يمكن الاستمتاع بها إلا من قبل الأثرياء اقتصاديًا. ثم، لا تهتم المؤسسات التعليمية إلا بسحب الرسوم الدراسية باهظة الثمن، ولكنها لا تهتم بتحسين جودة التعليم. يعتمد التسويق الأول على الحاجة الموضوعية للمؤسسة لتطوير عملية تعليمية عالية الجودة، بينما يستند الثاني إلى جشع مديري التعليم. تشمل أسباب تسويق التعليم ما يلي: سياسى، وثقافى، واقتصادى، واجتماعى، وتكنولوجى. سيكون لتسويق التعليم تأثير أيضًا: الطبقات الدنيا فى المجتمع غير قادرة على تحقيق رغباتهم بسبب ارتفاع تكلفة التعليم، إثراء بعض الأطراف، ألا تتناسب الرسوم المدفوعة مع التسهيلات المستلمة، لا تتناسب الرسوم المدفوعة مع جودة خريجي مؤسسة تعليمية رسمية وغير رسمية، إنشاء مجموعات عدم المساواة الاجتماعية من الأغنياء ومجموعات الفقراء، بدون أى بديل آخر للتعويض، سيؤدى ذلك إلى تنافس للحصول على التعليم فى مؤسسات تعليمية معروفة فى الداخل والخارج. هناك حلان فى التسويق: الأول، منهجى، وهو الحل بتغيير النظم الاجتماعية المتعلقة بنظام التعليم. ثانيًا، التقنية، أى الحلول التى تنطوى على مسائل تقنية تتعلق مباشرة بالتعليم.

Pendahuluan

Dalam berbagai wacana dan literatur sering dikemukakan bahwa pendidikan merupakan hak oleh setiap manusia. Sistem perundang-undangan bahkan setiap agama mengakui hal tersebut. Namun dewasa ini, kenyataan yang kita hadapi menunjukkan hal sebaliknya. Pendidikan menjadi barang mahal yang hanya terbeli oleh kalangan berkantong tebal. Pendidikan sudah menjelma menjadi komoditas yang bernilai jual menjanjikan. Sekolah dan

perguruan tinggi telah menjadi semacam badan usaha yang merasa berhak “menjual” jasa pendidikan kepada rakyat sesuai mekanisme pasar. Semakin tinggi permintaan, semakin tinggi pula posisi tawarnya. Pusat-pusat pendidikan favorit semakin tak terdatangi oleh rakyat biasa.

Mungkin realitas di atas masih bisa dimaklumi jika pelakunya hanya lembaga swasta. Akan tetapi, sungguh sulit diterima ketika bisnis pendidikan juga dilakoni lembaga pendidikan pemerintah. Sistem pendidikan mulai menjadikan sekolah sebagai *coorporate education* yang kental nuansa bisnisnya. Lembaga-lembaga pendidikan pemerintah sedang berbenah menuju sebuah perusahaan bisnis yang siap memburu pemasukan sebanyak-banyaknya untuk “biaya operasional” dan meraup keuntungan. Sementara masyarakat dengan kemampuan ekonomi pas-pasan semakin kecil peluangnya untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan yang layak.

Pengertian Komersialisasi Pendidikan

Pengertian komersialisasi pendidikan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), komersialisasi diartikan sebagai perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan.¹ Komersialisasi pendidikan dapat bermakna memperdagangkan pendidikan, karena menurut kamus, kata komersial atau *commercialize* berarti memperdagangkan.² Komersialisasi pendidikan dimaknai sebagai sebuah manajemen pendidikan yang menempatkan lembaga pendidikan sebuah institusi komersial. Sebagai lembaga komersial, maka lembaga pendidikan akan mengimplementasikan prinsip perilaku produsen, dalam literatur ekonomi liberal, tujuan produksi adalah untuk “*Profit Maximilizing*” dalam hal ini dimaknai secara finansial.

Adapun istilah “komersialisasi pendidikan” mengacu pada dua pengertian yang berbeda, yaitu:

¹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 794.

² *Ibid.*

1. Komersialisasi pendidikan yang mengacu lembaga pendidikan dengan program serta perlengkapan mahal. Pada pengertian ini, pendidikan hanya dapat dinikmati oleh sekelompok masyarakat ekonomi kuat, sehingga lembaga seperti ini tidak dapat disebut dengan istilah komersialisasi karena mereka memang tidak memperdagangkan pendidikan. Komersialisasi pendidikan jenis ini tidak akan mengancam idealisme pendidikan nasional atau idealisme Pancasila, akan tetapi perlu dicermati juga, karena dapat menimbulkan pendiskriminasian dalam pendidikan nasional.
2. Komersialisasi pendidikan yang mengacu kepada lembaga pendidikan yang hanya mementingkan uang pendaftaran dan uang gedung saja, tetapi mengabaikan kewajiban-kewajiban pendidikan.³ Komersialisasi pendidikan ini biasanya dilakukan oleh lembaga atau sekolah-sekolah yang menjanjikan pelayanan pendidikan tetapi tidak sepadan dengan uang yang mereka pungut dan lebih mementingkan laba.

Hal itu yang lebih berbahaya lagi, komersialisasi jenis kedua ini dapat pula melaksanakan praktik pendidikan untuk maksud memburu gelar akademik tanpa melalui proses serta mutu yang telah ditentukan sehingga dapat membunuh idealisme pendidikan. Komersialisasi ini pun telah berdampak pada tingginya biaya pendidikan. Secara gamblang, masyarakat “disuguhi sesuatu” yang seolah-olah mengamini kondisi tersebut.

Contoh sederhana dapat dilihat ketika memasuki tahun ajaran baru. Tak terbayangkan betapa banyaknya orang tua yang mengeluh akibat buku pelajaran yang digunakan tahun ajaran sebelumnya tidak lagi dapat digunakan di tahun ajaran berikutnya. Kondisi ini tentu sangat memberatkan masyarakat yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Siswa dipaksa menggunakan buku pelajaran baru sebagai pengganti buku lama yang “tidak layak”

³ Muchtari Buchtari, *Komersialisasi Idealisme Bukan Tabu* (Yogyakarta: Kanisius. 2001), h. 201.

dipakai sebagai acuan lagi, dengan harga yang relatif tinggi. Padahal jika dicermati, materi atau pokok bahasan di dalamnya sama persis, tanpa ada “ilmu” baru yang dicantumkan.

Di sisi lain, pengelolaan dunia pendidikan kita juga masih menggunakan konsep liberal. Artinya, konsep dunia pendidikan ini lebih mengutamakan kompetisi daripada persamaan hak untuk memperoleh pendidikan. Jika tetap mengedepankan pola ini, bagaimana nasib siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Kecenderungan mahal biaya pendidikan menimbulkan persoalan tersendiri di masyarakat, terutama di kalangan rakyat miskin. Bagi orang miskin, pendidikan menjadi “hantu” yang mengganggu harapan dan impiannya.

Sejumlah kisah tragis terjadi di sekitar kita: anak gantung diri karena malu belum bayar SPP, gadis ingusan menjadi pelacur karena putus sekolah, remaja-remaja tanggung menjadi anak jalanan atau preman karena negara (pemerintah pusat maupun daerah) tidak mengamalkan undang-undang. Sementara itu, dengan dalih meningkatkan kualitas (kenyataannya sering hanya memperkaya diri pengelola pendidikan!) hampir semua sekolah dan perguruan tinggi, negeri maupun swasta, memungut aneka rupa bayaran.

Komersialisasi pendidikan tidak lagi terelakkan. Dalam kondisi demikian hanya anak-anak orang kayalah yang nyaman bersekolah/kuliah. Melihat kenyataan ini Azyumardi Azra, menganggap sistem pendidikan kita telah pincang. Rakyat kecil sukar menembus jaring-jaring dunia pendidikan. Azyumardi, juga mengatakan bahwa lembaga pendidikan formal akhirnya hanya menjadi alat untuk menyebarluaskan penindasan terhadap rakyat miskin. Hal ini mengakibatkan rakyat kehilangan kesadaran, baik terhadap diri sendiri maupun penindasnya. Rakyat dibuat pasrah oleh “nasib”, terpenjara dalam “*culture of silence*”.⁴

Ada banyak faktor yang menyebabkan pendidikan kita kurang menghargai orang miskin dan membuatnya terjebak pada arus

⁴ Azyumardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), h. 109-111.

komersialisasi. Salah satu faktor itu adalah mental pragmatisme yang menghinggapi manusia dan masyarakat. Sebuah masyarakat yang dihuni manusia pragmatis dengan sendirinya menciptakan tatanan sosial-budaya-politik pragmatis. Dalam kesadaran manusia pragmatis, uang (*cash value*) melandasi seluruh sikap dan tindakannya. Sikap dan tindakan manusia akan dikatakan “benar” dan “berguna” jika langsung menghasilkan uang/material. Itu sebabnya “ukuran sukses” seseorang, martabat seseorang, eksistensi seseorang, amat tergantung pada jumlah uang yang dimilikinya. Dunia pendidikan tidak sanggup menghindarkan diri dari logika itu. Hampir semua kebijakan pengelolaan pendidikan tidak luput dari pertimbangan uang. Inilah sebab komersialisasi pendidikan yang didukung ekspansi kapitalisme global, yang merambah berbagai sendi kehidupan.

Istilah “pragmatis” berakar pada filsafat pragmatisme. Ketika merumuskan pragmatisme, James menyebut dua kata kunci: “tindakan” dan “konsekuensi praktis”. Menurut pragmatisme, tindakan harus dipahami dengan melihat konsekuensi praktis yang dihasilkannya.⁵ Selanjutnya Haniah juga mengatakan, pragmatisme adalah filsafat yang mementingkan “kepraktisan” dan “kerja keras” dengan kriteria utama “sukses” material. Dengan kriteria itulah pragmatisme dianggap filsafat bisnis-materialistis.⁶ Dalam perbandingannya dengan pemikiran Islam, Kuntowijoyo mengatakan bahwa kebenaran pragmatisme berbeda dengan kebenaran Islam karena dalam pandangan Islam kebenaran adalah apa saja yang datang dari Tuhan, baik berguna maupun tidak dalam kehidupan praktis sekarang ini. Itulah sebabnya konsep kemajuan (bisnis, ilmu, budaya, dan teknologi) dalam Islam berbeda dengan kemajuan dalam pandangan pragmatisme.⁷

⁵ Soni Keraf, *Pragmatisme Menurut William James* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), h. 35.

⁶ Haniah, *Agama Pragmatis: Telaah atas Konsepsi Agama John Dewey* (Magelang: Indonesiatara, 2001), h. 23.

⁷ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Bandung: Teraju Mizan, 2004), h. 5.

Selain berpijak pada pragmatisme, uang merupakan sisi penting kapitalisme. Menurut Loomba, kedudukan uang di tengah masyarakat kapitalisme, otomatis menggantikan kedudukan manusia, hubungan-hubungan manusiawi dan akhirnya membendakan (*reifikasi*) manusia.⁸ Gerak manusia, masyarakat, dan dunia pendidikan tidak pelak lagi dikendalikan kapitalisme. Dunia pendidikan akhirnya cenderung menjadi bagian ekspansi bisnis industri kapitalisme.

Presiden Soekarno, dengan visi kebangsaannya, sudah melihat tanda-tanda bahaya ini. Di tahun 30-an beberapa kali ia mengkritik kapitalisme dan menyimpulkan “borjuisme harus ditolak, kapitalisme harus dilawan!” Akan tetapi, meski Soekarno berpendapat demikian, kapitalisme bergulir dan mencapai puncaknya di zaman Soeharto yang memberikan aneka macam proteksi, subsidi, keringanan dan kemudahan, termasuk *tax-holiday* yang merugikan rakyat dan negara.⁹ Di era kapitalisme yang ditandai banjir iklan berbagai produk industri dan hiburan di media massa, hasrat konsumsi dan histeria gaya hidup membelit mental manusia dan masyarakat.

Hasrat konsumtif dan kegandrungan gaya hidup menjadi watak masyarakat kapitalisme. Sekarang ini, bukan lagi kesadaran manusia yang menggerakkan kehidupan, melainkan benda-benda produk industri yang lalu-lalang setiap hari.¹⁰ Dalam beberapa hal, mental pragmatis berubah menjadi skizoprenia, di mana kebiasaan mengkonsumsi produk industri tidak lagi didasarkan pada nilai guna, melainkan citra dan gaya hidup penuh mimpi dan ilusi. Itu sebabnya banyak orang sekolah/kuliah, bahkan “membeli gelar akademik”, selain untuk kepentingan bisnis dan jabatan, didasarkan pada citra dan gaya hidup.

⁸ Ania Loomba, *Colonialism-Postcolonialism* (New York: Roulledge, 2000), h. 29.

⁹ Dawam Rahardjo, *Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 133-135.

¹⁰ Yasraf A. Pilliang, *Hiper-Realitas Kebudayaan* (Yogyakarta: LKIS, 1999), h. 88-89 dan 99-102.

Permasalahan yang diuraikan di atas, jika tidak disikapi kritis, bukan tidak mungkin akan melenyapkan manusia dan seluruh nilai kemanusiaannya. Manusia lalu menjadi mesin tanpa karakter: tubuh-tubuh tenggelam di mall, histeris memuja konsumsi, serakah tidak terpuaskan, mementingkan diri sendiri, gila dan merana, penuh mimpi dan ilusi, sakit dan tidak terobati. Poole, seorang dosen filsafat moral di Macquaire University, ketika membahas moralitas di tengah “masyarakat komersial”, mengkritik kapitalisme, dengan mengatakan bahwa apa yang dicapai kapitalisme (produksi-konsumsi-komersialisasi) sesungguhnya bukanlah kepuasan, melainkan frustrasi, bukanlah kreativitas dan ketenangan, melainkan repetisi tanpa akhir, yang sejenak diselang-selingi kenikmatan sesaat. Modernitas membutuhkan moralitas, tetapi pada saat bersamaan kapitalisme memustahilkannya.¹¹

Kapitalisme yang muncul pada abad ke-17 ini sebagai bagian dari proyek modernisme dan kolonialisme yang melahirkan imperialisme. Meski kolonialisme politik-formal sudah tidak ada, tetapi menurut Loomba dalam *Colonialism/Postcolonialism* (2000), neo-imperialisme/neo-kolonialisme terus berlangsung dilakukan negara-negara maju melalui kontrol dan ekspansi ekonomi global. Dalam konteks ini, Cesaire, seorang aktivis poskolonialisme Afrika, mendakwa kapitalisme sebagai selain mengeksploitasi manusia, membendakan manusia terjajah sekaligus penjajahnya.¹²

Kehendak dan perjuangan negara-negara dunia ketiga untuk membebaskan diri dari aneka macam “penjajahan” (politik, ekonomi, budaya) mendapat tantangan besar dari neo-imperialisme (kapitalisme) dalam bentuk ekspansi pasar kapitalisme. Secara ekonomis, praktik kolonialisme-imperialisme di zaman dahulu dan praktik neokolonialisme/neo-imperialisme (kapitalisme) di zaman sekarang, lebih banyak merugikan negara-

¹¹ Ross Poole, *Moralitas dan Modernitas di Bawah Bayang-bayang Nihilisme* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 190.

¹² Loomba, *Colonialism*, h. 19.

negara dunia ketiga. Sebagaimana diungkapkan oleh Fanon, dalam bukunya yang berjudul *The Wretched of The Earth*, negara-negara dunia ketigalah yang membuat bangsa Eropa-Amerika kaya dan mewah. Melalui praktik kolonialisme-imperialisme, kekayaan negeri-negeri dunia ketiga mengalir ke dalam kas negara-negara Eropa dan Amerika.¹³

Komersialisasi pendidikan telah menjadi pengetahuan masyarakat. Seringkali sekolah-sekolah dan kampus-kampus menyajikan pelayanan tidak sepadan dengan uang sekolah yang mereka pungut. Di sekolah seperti ini, “laba” atau “selisih anggaran” tidak ditanamkan bagi infrastruktur pendidikan, melainkan untuk “memperkaya” pengelola pendidikan.¹⁴ Itu sebabnya muncul potret ironis: para pengelola pendidikan hidup mewah, sarana dan fasilitas pendidikan yang dikelolanya mengkhawatirkan.

Mental pragmatisme, arus deras kapitalisme global, menjadikan manusia dan masyarakat tergelincir pada tindakan komersialis untuk mengejar citra dan gaya hidup penuh mimpi dan ilusi. Pada gilirannya sekolah dan kampus ikut-ikutan menempatkan diri sebagai “pabrik ijazah” yang memproduksi “komoditas ilmu” dalam logika bisnis-ekonomi. Sebagai produk modernisme dan kolonialisme, kapitalisme memiliki watak sama dengan imperialisme-kolonialisme yang menjajah dan menindas negeri-negeri dunia ketiga. Pertanyaannya, apakah lembaga dan para pengelola pendidikan akan membiarkan proses “penjajahan” kapitalisme yang menyebabkan pembendaan (*reifikasi*) manusia terus berlangsung? Apakah akan tega membiarkan masyarakat, terutama kaum miskin, ditindas berbagai hal yang membuatnya lumpuh tidak berdaya? Atau akan melakukan kritik, bahkan perlawanan, terhadap berbagai bentuk ketidakberesan itu!

¹³ Frantz Fanon, *The Wretched of the Earth: The Handbook for the Black Revolution That is Changing the Shape of the World* (New York: Grove Press, 1963), h. 78-80.

¹⁴ Buchtari, *Komersialisasi*, h. 44

Penyebab Munculnya Komersialisasi Pendidikan

Adanya akibat, tentu ada pula penyebabnya. Penyebab komersialisasi pendidikan apabila menggunakan teori ekuivalensi tentu sangat banyak. Semua faktor baik yang langsung atau tidak langsung bisa menjadi sebab, di antaranya:

1. Politik

Pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia juga memiliki aspek politik karena dalam pengelolaan harus berdasarkan ideologi yang dianut negara. Adapun ideologi pendidikan kita adalah ideologi demokrasi Pancasila, yaitu setiap warga negara mendapat kebebasan dan hak yang sama dalam mendapat pendidikan. Dalam Pembukaan UUD 45 pada alinea ke-4, hal ini pun tercermin ada kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁵

Atas dasar itu sudah seharusnya pemerintah dalam menetapkan setiap kebijakan pendidikan merujuk pada ideologi negara. Akan tetapi dalam kenyataannya melalui pemerintah mengeluarkan PP. No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum, pemerintah telah memberikan otonomi pada perguruan tinggi dalam mengelola pendidikan lembaganya termasuk pencarian dana bagi biaya operasionalnya.¹⁶

Apabila pendidikan tetap mahal dan dikomersialisasikan, masyarakat yang kurang mampu tidak akan dapat meningkatkan status sosial mereka, dan ironisnya komersialisasi pendidikan ini didukung oleh tatanan sosial dan diterima oleh masyarakat. Akibat longgarnya sanksi sosial dan kurangnya kontrol pemerintah, komersialisasi pendidikan tumbuh subur serta membentuk sosial gap atau diskriminasi dalam pendidikan antara masyarakat yang mampu dengan yang tidak mampu.

¹⁵ Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum.

2. Budaya

Budaya bangsa kita mengagungkan gelar akademis dan sebagai contoh dihampir setiap dinding rumah yang keluarganya berpendidikan selalu terpajang foto wisuda anggota keluarga lulusan dari universitas manapun. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa kita masih menganut budaya yang *degree minded*. Budaya berburu gelar ini berkembang pada lembaga pemerintah yang mengangkat atau mempromosikan pegawai yang memiliki gelar sarjana tanpa terlebih dahulu diteliti dan dites kemampuan akademik mereka.

Ironisnya program pendidikan seperti ini banyak diminati oleh pejabat-pejabat. Dengan komersialisasi pendidikan berarti ideologi kapitalisme telah masuk kampus. Ideologi ini memberikan kebebasan pada individu atau kelompok untuk berusaha, sementara intervensi pemerintah harus berkurang. Akibat masuknya ideologi ini akan dapat menggeser pendidikan demokrasi Pancasila kalau pemerintah tidak cepat tanggap dalam hal ini.

3. Ekonomi

Sudah pasti kita akan membicarakan aspek ekonomi terkait dengan masalah biaya. Biaya pendidikan nasional seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi dengan keluarnya UU No. 20 Tahun 2003 pada bab XIV pasal 50 ayat 6 dinyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan lembaganya.¹⁷ Hal ini menunjukkan ketidak mampuan pemerintah membiayai pendidikan nasional, khususnya pendidikan tinggi yang dulu mendapat subsidi dari pemerintah sebanyak 75% dan 25% lagi berasal dari biaya masyarakat termasuk dana SPP.

¹⁷ Depdiknas, *Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional*

Namun subsidi 75% dicabut dan kemudian pemerintah memberikan status BHMN (Badan Hukum Milik Negara) kepada beberapa perguruan tinggi negeri agar mengelola keuangannya masing-masing. Berbagai program pendidikan ditawarkan oleh pengelola perguruan tinggi untuk memaksimalkan potensi intuisinya dalam mencari sumber pendanaan. Beberapa perguruan tinggi ternama membuka jalur khusus dalam penerimaan mahasiswa baru dengan tarif mulai dari Rp. 15 juta sampai dengan Rp. 150 juta.

Hal ini terjadi akibat dari lepasnya tanggung jawab pemerintah dalam membiayai pendidikan sehingga berdampak pada komersialisasi pendidikan di perguruan tinggi negeri (berstatus BHMN), yang tentu saja menguntungkan. Alasan untuk menciptakan pendidikan yang bermutu perlu biaya besar dan mahal bagi kalangan masyarakat yang kehidupan ekonominya lemah, maka status BHMN akan menjadi momok yang menakutkan.

4. Sosial

Pendidikan sangat menentukan perubahan strata sosial seseorang, yaitu semakin tinggi pendidikan seseorang, akan semakin meningkat pula strata sosialnya, begitu juga sebaliknya. Sesuai dengan pendapat Kartono, yang menyatakan: tingginya tingkat pendidikan dan tingginya taraf kebudayaan rakyat akan menjadi barometer bagi pertumbuhan bangsa dan negara yang bersangkutan.¹⁸ Akan tetapi bagaimana orang dapat mencapai pendidikan tinggi apabila biaya pendidikan tersebut mahal dan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi mapan saja. Lantas bagaimana dengan masyarakat golongan ekonomi lemah.

¹⁸ Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), h. 97.

5. Teknologi

Dengan berkembang pesatnya teknologi maka semakin menuntut sekolah-sekolah untuk menunjang berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Tapi, tak jarang lembaga pendidikan menjadikannya sebagai tameng untuk melakukan komersialisasi pendidikan. Biasanya lembaga pendidikan berujar, “Ini dilakukan agar para peserta didik bisa mengikuti perkembangan teknologi yang dari hari ke hari semakin maju”.

Oleh karena uang masuk atau SPP semakin mahal, implikasinya peserta didik yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah tidak bisa menyanggupinya. Ujung-ujungnya, mereka ketinggalan dalam hal teknologi. Padahal dengan perkembangan teknologi bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan, dan kehidupan bangsa.

Dampak Komersialisasi Pendidikan

Dengan terciptanya komersialisasi pendidikan di negara ini maka akan memberikan dampak bagi masyarakat, ada beberapa masalah yang timbul diantaranya:

1. Rakyat kalangan bawah tak mampu untuk merealisasikan keinginannya dikarenakan biaya pendidikan yang mahal.
2. Memperkaya pihak-pihak tertentu
3. Biaya yang dibayar tidak sebanding dengan sarana-prasarana yang diterima
4. Biaya yang dibayar tidak sebanding dengan kualitas lulusan suatu lembaga pendidikan formal-informal.
5. Menimbulkan kesenjangan sosial kelompok orang-orang kaya dan kelompok orang-orang miskin.
6. Komersialisasi Pendidikan tanpa adanya alternatif lain untuk mengimbanginya akan menyebabkan orang berlomba-lomba untuk memperoleh pendidikan di Universitas atau Sekolah yang terkenal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ujung-ujungnya bagi kelompok kaya, ada yang mencari jalan

pintas agar dapat gelar S2 dan S3 dari Universitas atau Sekolah bergengsi dengan mengucurkan dana yang besar agar mendapatkan kemudahan-kemudahan.

Untuk menghindari dari dampak sosial yang terjadi akibat komersialisasi pendidikan maka diperlukan suatu solusi sebagai jalan tengah. Karena munculnya komersialisasi pendidikan adalah sebagai akibat dari pelepasan tanggung jawab pemerintah yang telah mencabut subsidi pembiayaan terutama pada perguruan tinggi dan pemberian hak otonomi serta status BHMN pada perguruan tinggi negeri. Hal inilah yang menodorong para pebisnis menjadikan dunia pendidikan sebagai salah satu tonggak utama usaha mereka dengan membuka yayasan-yayasan pendidikan tentu saja dengan tujuan “mendapatkan keuntungan” bukan lagi “mencerdaskan kehidupan bangsa” seperti tertera pada UUD 1945.

Prinsip nirlaba mestinya menjadi roh dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Sehingga diharapkan bisa mencegah terjadinya praktek komersialisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan. Karena prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan pendidikan, menekankan bahwa kegiatan pendidikan tujuan utamanya tidak mencari laba, melainkan sepenuhnya untuk kegiatan meningkatkan kapasitas dan mutu layanan pendidikan. Dewasa ini seperti yang sudah diketahui dana APBN sebesar 20% tidak dapat mencegah makin maraknya komersialisasi pendidikan di Indonesia, belum lagi pendidikan yang seyogyanya dijadikan jasa yang dapat dinikmati setiap orang seolah-olah menjadi komoditas utama yang dapat bahkan harus dijual dengan harga tinggi.

Di satu sisi, harus dipahami bahwa lembaga pendidikan bukanlah lembaga yang murni bersifat sosial, dan bersifat nirlaba.¹⁹ Dalam operasionalisasinya sebuah lembaga pendidikan memerlukan dana yang besar untuk membangun gedung, menyediakan fasilitas pengajaran yang memadai dan juga membiayai tenaga edukatif. Dari

¹⁹ J.I.G.M. Drost, *Sekolah; Mengajar atau Mendidik?* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 222.

sisi ini, jelas bahwa pendidikan memang "harus" mahal, namun di sisi lain mahalnya biaya pendidikan akan mengakibatkan terhalangnya kaum tak punya (*the have nots*) untuk mendapatkan pendidikan yang baik, walaupun mereka memiliki bakat yang bagus.

Caporaso, menganggap bahwa pendidikan merupakan barang publik karena bersifat non eksklusif dan non rivalry yakni tiap warga mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan yang layak.²⁰ Oleh karena itu pendidikan tidak boleh diserahkan ke pasar untuk diproduksi karena akan menyebabkan biaya pendidikan atau harga pendidikan menjadi mahal sehingga kesempatan dan akses memperoleh pendidikan menjadi terbatas.

Berikut ini ada beberapa hal yang bisa menjadi solusi alternatif penanggulangan komersialisasi pendidikan di antaranya yaitu:

1. Pembentukan lembaga non pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengawasi jalannya sistem pendidikan.

Alasan mengapa lembaga ini harus bersifat non pemerintah adalah agar dalam pelaksanaannya, lembaga ini tidak terpengaruh dan tidak tertekan oleh pihak manapun. Lembaga ini nantinya diharapkan mampu bersikap mandiri dan independen, sehingga ketika terjadi penyimpangan, mereka berani melaporkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa takut akan ancaman apapun dan dari siapapun. Lembaga ini berhak melakukan evaluasi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang pendidikan, seperti dana BOS dan sekolah dengan status RSBI, agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun bersifat non pemerintah, dalam melaksanakan tugasnya, lembaga ini tetap harus berkoordinasi dengan Departemen Pendidikan untuk mencapai tujuan mulia bersama.

²⁰ James A. Caporaso dan David P. Levine, "Theories of Political Economy", dalam: William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: UGM, 2003), h. 121.

2. Pemberian beasiswa yang lebih gencar kepada para pelajar yang berprestasi dan tidak mampu dalam hal biaya.

Upaya ini sebagai antisipasi agar para pelajar yang berprestasi dan tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani biaya dan termotivasi untuk belajar lebih baik. Meski begitu, dalam distribusinya nanti, perlu ada survey terlebih dahulu terkait kondisi pelajar yang sesungguhnya agar pemberian beasiswa tersebut dapat tepat sasaran dan penggunaan. Selain survey, juga perlu adanya sosialisasi terkait segala bentuk beasiswa, karena kurangnya akses informasi bagi pelajar yang tidak mampu, menjadikan mereka seringkali tidak begitu paham tentang berbagai informasi terkait beasiswa tersebut.

3. Pencanaan program “Wajib Belajar 12 Tahun”

Pada program ini, nantinya SMA/ sederajat memperoleh aliran dana BOS, sehingga biaya pendidikan dapat ditanggung oleh pemerintah dan tidak begitu memberatkan bagi orangtua/wali murid. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi komersialisasi dan komoditasi pendidikan di jenjang SMA/ sederajat, dan biaya tinggi tak lagi menjadi alasan bagi mereka yang tidak mampu untuk berhenti belajar disekolah.

4. Pemeriksaan rutin transaksi keuangan di seluruh lembaga pendidikan (tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi), baik negeri maupun swasta, oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Dari lembaga pemerintah dapat diwakilkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan dari lembaga non pemerintah dapat diwakilkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli dengan dunia pendidikan. Solusi ini diambil sebagai langkah antisipasi terjadinya penggunaan dana yang tidak tepat serta penyelewengan dana oleh oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari proses pendidikan.

Penarikan uang untuk biaya sekolah seharusnya disampaikan dengan jelas dan terinci. Biasanya modus penarikan untuk pendidikan yang bermacam-macam. Diantaranya pembayaran ekstrakurikuler, dana untuk keselamatan, dana untuk membeli gorden kelas, biaya wisuda, serta biaya untuk membeli LKS dan seragam. Pungutan tersebut semestinya tidak perlu. Mengingat Dinas Pendidikan (Dindik) sudah mempunyai anggaran khusus. Wajib belajar 9 tahun pun telah dibebaskan biaya melalui penyaluran BOS daerah dan BOS nasional.

5. Mengadakan rapat komite sekolah yang terbuka, transparan, dan akuntabilitasnya terjamin

Komite sekolah seharusnya terbuka tentang program sekolah. Untuk merumuskan kebutuhan, sekolah juga bisa melibatkan siswa, karena yang tahu kebutuhannya adalah siswa sendiri. Dalam rapat komite sekolah harus jelas dan transparan sehingga tidak ada wali murid yang keberatan adanya penarikan dana.

6. Penggunaan dana BOS dengan tepat sasaran

Adanya dana BOS dari Dinas Pendidikan seharusnya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang sarana-prasarana lembaga pendidikan. Tak hanya biaya sekolah yang mahal tetapi fasilitas yang didapat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Biaya yang besar dikeluarkan juga mempengaruhi kualitas dari peserta didik. Semakin mahal sekolah maka semakin baik kualitas pendidikan ditempat tersebut. Apakah hal ini dapat dibenarkan, tentu saja hal ini tidak menjamin.

7. Pengawasan ketat dari pihak Dinas Pendidikan terhadap lembaga pendidikan.

Pengawasan ini digunakan untuk mencapai kegagalan komite sekolah yang “nakal”. Penggunaan uang penarikan dari siswa digunakan tidak semestinya, yang mengakibatkan tindak

korupsi. Sudah banyak orang yang terlibat dalam lembaga pendidikan yang terjerat tindak korupsi. Ini yang menyebabkan adanya rapat komite yang tertutup. Pengaliran dana tidak jelas.

Di samping beberapa solusi di atas menurut Made Pidarta, secara garis besar ada dua solusi yang dapat diberikan yaitu: Pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan.²¹ Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme (mazhab neoliberalisme), yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan.

Maka, solusi untuk masalah-masalah yang ada, khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Akan sangat kurang efektif kita menerapkan sistem pendidikan Islam dalam atmosfer sistem ekonomi kapitalis yang kejam. Maka sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintahlah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan negara.

Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan.²² Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, meningkatkan keprofesionalan guru, meningkatkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki guru dan memberikan

²¹ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 72.

²² *Ibid.*

berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Misalnya rendahnya prestasi siswa diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga, sarana dan prasarana pendidikan, dan sebagainya.

Kesimpulan

Istilah komersialisasi pendidikan dapat dipergunakan untuk mengacu pada dua hal yang berbeda. Istilah ini dapat merujuk pada sekolah atau perguruan tinggi yang memiliki program dan sarana prasarana yang baik, dan ditunjang dengan biaya pendidikan yang mahal. Biaya pendidikan yang mahal ini menyebabkan sekolah-sekolah ini hanya bisa dinikmati oleh kalangan kaya yang mampu secara ekonomi, jika tidak ada kebijakan diskriminatif yang adil. Istilah komersialisasi pendidikan juga bisa mengacu pada sekolah yang hanya mementingkan penarikan biaya pendidikan seperti uang sekolah dan uang kuliah yang tinggi, namun tak memperhatikan peningkatan mutu proses pendidikan yang berlangsung. Bentuk komersialisasi yang pertama didasarkan pada kebutuhan obyektif lembaga untuk mengembangkan sebuah proses pendidikan yang berkualitas, sedangkan yang kedua didasarkan pada nafsu serakah para pengelola pendidikan. Tentu saja dua jenis komersialisasi ini harus disikapi secara berbeda, karena yang satu timbul dari kepedulian terhadap pendidikan, sedangkan yang lain berawal dari ketidakpedulian pada pendidikan.

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya komersialisasi pendidikan diantaranya: Politik, budaya, ekonomi, sosial, dan teknologi. Komersialisasi pendidikan ini juga akan memberikan dampak, di antaranya: Rakyat kalangan bawah tak mampu untuk merealisasikan keinginannya dikarenakan biaya pendidikan yang mahal; memperkaya pihak-pihak tertentu; biaya yang dibayar tidak sebanding dengan sarana-prasarana yang diterima; biaya yang dibayar tidak sebanding dengan kualitas lulusan suatu lembaga pendidikan formal-informal; Menimbulkan kesenjangan sosial kelompok orang-orang kaya dan kelompok orang-orang miskin;

Komersialisasi Pendidikan tanpa adanya alternatif lain untuk mengimbangnya akan menyebabkan orang berlomba-lomba untuk memperoleh pendidikan di Universitas atau Sekolah yang terkenal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dari sebab dan akibat yang terjadi oleh komersialisasi pendidikan diperlukan beberapa solusi untuk mengatasinya. Secara garis besar ada dua solusi yang dapat diberikan yaitu: Pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Azra, Azyumardi, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Buchtari, Mughtari, *Komersialisasi Idealisme Bukan Tabu*, Yogyakarta: Kanisius. 2001
- Caporaso, James A. dan David P. Levine, *Theories of Political Economy*, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UGM, 2003.
- Drost, J.I.G.M., *Sekolah; Mengajar atau Mendidik?* Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Depdiknas, *Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional*.

Fanon, Frantz, *The Wretched of The Earth: The Handbook for The Black Revolution That is Changing The Shape of The World*, New York: Grove Press, 1963.

Haniah, *Agama Pragmtis; Telaah atas Konsepsi Agama John Dewey*, Magelang: Indonesiatera, 2001.

Kartono, Kartini, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Keraf, Soni, *Pragmatisme Menurut William James*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu; Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Bandung: Teraju Mizan, 2004.

Loomba, Ania, *Colonialism-Poscolonialism*, New York: Roulledge, 2000.

Pidarta, Made, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Pilliang, Yasraf A., *Hiper-Realitas Kebudayaan*, Yogyakarta: LKIS, 1999.

Poole, Ross, *Moralitas dan Modernitas di Bawah Bayang-bayang Nihilisme*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum.

Rahardjo, Dawam, *Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa*, Yogyakarta: UII Press, 1999.